

BAGIAN SATU
MENGUTAMAKAN
BUDAYA MUTU

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNGGUL

Ada fenomena yang saling bertentangan tatkala kita menyaksikan perjuangan sekolah untuk mendapatkan peserta didik baru. Ada sekolah yang laris manis sehingga pendaftarannya melampaui daya tampung. Bahkan dengan gagah sekolah ini menolak banyak pendaftar. Fenomena ini biasanya dialami sekolah berkategori mapan dengan segudang prestasi. Sementara di tempat lain, ada sekolah yang harus berjuang hingga titik darah penghabisan untuk mendapatkan peserta didik. Bahkan hingga tahun ajaran baru dimulai, sekolah ini masih menerima pendaftaran. Itu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan nasib sekolah. Kondisi ini biasanya dialami sekolah berkategori kecil dan miskin prestasi.

Pertanyaannya, kenapa ada sekolah yang laku keras dengan jumlah peminat luar biasa banyak? Sementara di tempat lain ada sekolah yang justru tidak laku sehingga sangat sulit mendapatkan peserta didik. Perbedaan nasib sekolah ini terjadi dikarenakan faktor keunggulan. Itu berarti, jika lembaga pendidikan berkategori unggul, maka di mana pun posisinya pasti akan didatangi masyarakat.

Dalam konteks inilah lembaga pendidikan harus mampu memberikan layanan yang bermutu tinggi. Sebab,

jika satuan pendidikan gagal menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan maksimal, maka cepat atau lambat pasti akan ditinggalkan *stakeholder*-nya.

Sekolah unggul merupakan terjemahan dari beberapa terma seperti *effective school*, *efficiency school*, *high performance school*, dan *excellent school*. Dalam praktiknya, untuk mengenalkan pada masyarakat bahwa sekolahnya bermutu, maka digunakan *branding* sekolah unggul, sekolah plus, sekolah favorit, sekolah model, rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), dan sekolah berstandar internasional (SBI). Beberapa *branding* ini boleh digunakan asalkan di sekolah tersebut diterapkan budaya mutu. Artinya, ada jaminan standar mutu layanan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Persoalan layanan mutu ini penting karena ada kalanya orang memahami pendidikan unggul sekedar dilihat dari sarana fisik, besarnya SPP, dan peserta didiknya yang memang pilihan. Akibatnya muncul persepsi bahwa sekolah unggul itu harus serba “wah”. Tom J. Parkins (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada tiga indikator yang harus dimiliki sekolah unggul: input, proses, dan output. Dari tiga indikator ini, Tom merumuskan tesis mengenai konsep sekolah unggul.

Menurut Tom, sekolah unggul dapat dilihat dari dua kategori; *best input* dan *best process*. Sekolah unggul dengan kategori *best input* biasanya berusaha untuk memperoleh peserta didik yang bernilai tinggi. Dalam praktiknya, sekolah ini menerapkan tes masuk yang sangat ketat, terutama kemampuan akademik peserta didik. Harapannya, sekolah memperoleh peserta didik terbaik di bidang akademik. Dengan demikian output yang dihasilkan sekolah pasti lulusan dengan capaian akademik hebat.

Pertanyaannya, capaian akademik hebat itu dikarenakan proses pendidikan di sekolah atau faktor lain? Diduga kuat anak-anak hebat lulusan sekolah yang menekankan pada

best input dikarenakan anaknya memang sudah hebat sejak masuk, ditambah dengan fasilitas bimbingan belajar di luar sekolah. Ini berarti kontribusi guru dalam proses pendidikan pada sekolah yang menekankan *best input* sangat kecil.

Sekolah unggul kategori kedua menekankan pada *best process*. Sekolah ini biasanya tidak begitu menekankan pada kualitas akademik anak pada saat awal masuk. Dalam kondisi apa pun peserta didik yang mendaftar akan diterima. Semua peserta didik yang mendaftar akan dipelajari dan dipetakan berdasarkan keunggulannya.

Jadi, tidak ada proses seleksi yang “jlimet” untuk sekolah ini karena gurunya telah menyiapkan diri menjadi agen perubahan (*agent of change*). Setiap guru menyadari bahwa tugas mereka adalah mengubah karakter anak dari yang biasa saja menjadi luar biasa. Guru di sekolah ini meyakini bahwa setiap anak pasti telah memiliki keunggulan, minat, dan bakat, yang unik sebagai anugerah dari Tuhan. Tugas guru adalah memfasilitasi anak agar memaksimalkan potensi bawaan tersebut.

Tipe kedua inilah yang sesungguhnya layak disebut sekolah unggul. Tetapi sangat disayangkan, jumlah sekolah yang menekankan keunggulan pada *best process* ternyata sangat sedikit. Hasil penelitian Tom menunjukkan bahwa 99 persen sekolah unggul di Indonesia membangun keunggulannya dengan strategi *best input*. Ini berarti hanya satu persen sekolah yang menekankan keunggulannya pada *best process*.

Tugas kita sekarang adalah mendorong sekolah agar menempuh strategi *best process*, yang tentunya membutuhkan guru hebat. Ini penting ditekankan karena jantung pendidikan sesungguhnya ada pada proses pembelajaran. Ini berarti guru harus keluar dari pakem kurikulum untuk menjadi guru inspiratif.

BERSINERGI MENJADI YANG TERBAIK

Salah satu agenda rutin tahunan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur adalah menyelenggarakan Muhammadiyah Education Award (ME-Award), pengembangan dari OlyCon (Olympiad & Conference). Puncak acaranya ditandai dengan penghargaan bagi para pemenang olimpiade peserta didik, guru, dan sekolah Muhammadiyah. Selain olimpiade, acara ini juga mempertandingkan mutu antar sekolah Muhammadiyah dalam tiga kelompok: *outstanding school* (sekolah terkemuka), *excellent school* (sekolah unggul), dan *inspiring school* (sekolah inspirasi).

Sekolah berkategori *outstanding school* adalah yang terbaik dari yang terbaik (*the best of the best*). Penilaiannya didasarkan *achievement* yang luar biasa sejak OlyCon pertama. Indikator lainnya adalah meraih penghargaan sekolah unggul terbaik selama lima tahun terakhir. Sekolah kategori ini berhak memperoleh pendampingan dari tim yang ditunjuk Majelis Dikdasmen PWM Jatim. Konsekuensinya, sekolah berlabel prestisius ini ditugaskan untuk membina sekolah Muhammadiyah yang lain.

Pada tahun 2011, juga ada 30 sekolah Muhammadiyah yang ditetapkan sebagai *excellent school*. Sekolah kategori ini dianggap telah melampaui delapan standar nasional pendidikan (SNP) sebagaimana diundangkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005. Dikatakan melampaui karena sekolah ini juga memenuhi aspek tambahan berupa kewajiban membangun kultur hidup islami dan ber-Muhammadiyah. Perwujudan aspek tambahan ini dapat dilihat melalui kebijakan pimpinan untuk menjamin pelaksanaan nilai-nilai Keislaman dan Kemuhammadiyah bagi warga sekolah.

Ditetapkan juga sembilan sekolah Muhammadiyah berkategori *inspiring school*. Sekolah kategori ini dinilai berdasarkan kegigihannya dalam meraih prestasi di tengah persaingan antar sekolah yang kian kompetitif. Penghargaan terhadap sekolah yang menginspirasi ini penting untuk memberikan spirit pada sekolah Muhammadiyah agar terus bertahan dan meraih prestasi.

Jika dilihat dari aspek mutu, maka dapat dikatakan bahwa sekolah Muhammadiyah di Jatim yang berjumlah 937 itu sangat bervariasi. Yang terbesar adalah kelompok sekolah berkategori menengah ke bawah. Penghargaan untuk sekolah inspirasi ini diharapkan menjadi cerita sukses bagi sekolah lain. Di masa mendatang, kita ingin melihat kisah yang menginspirasi sebagaimana pernah dicontohkan SD Muhammadiyah 16 Surabaya (Sekolah Kreatif).

Kategori *outstanding*, *excellent*, dan *inspiring* sekaligus menunjukkan keragaman mutu sekolah Muhammadiyah. Bermula dari realitas inilah Majelis Dikdasmen tingkat wilayah, daerah, dan cabang, harus melakukan sinergi untuk memperpendek kesenjangan mutu antar sekolah Muhammadiyah. Untuk kepentingan ini rasanya kita perlu menemukan strategi yang tepat. Pilihan strategi yang dapat diambil adalah

mewujudkan sekolah berkategori unggul di setiap kabupaten dan kota se-Jatim. Jika ini dapat dicapai, maka virus sekolah unggul akan terus menyebar sehingga semakin banyak sekolah Muhammadiyah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Sekolah Standar Nasional (SSN), dan Sekolah Kategori Mandiri (SKM).

Pilihan strategi tersebut terasa sejalan dengan amanat musyawarah wilayah (musywil) Muhammadiyah ke-14 di Jember pada 9-10 Oktober 2010 lalu. Pada saat itu dicetuskan keinginan membentuk sekolah unggul untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Melalui strategi *modeling* sekolah Muhammadiyah di setiap kabupaten dan kota dimaksudkan agar kepala sekolah, guru, dan Majelis Dikdasmen, memperoleh kemudahan dalam mewujudkan sekolah unggul. Dengan demikian untuk melihat sekolah unggul, maka warga Muhammadiyah tidak perlu datang ke kota-kota metropolitan.

Untuk mewujudkan sekolah unggul di setiap kabupaten dan kota jelas diperlukan kerjasama dengan semua pihak. Termasuk dalam hal ini adalah pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM). Pada konteks ini perlu dibangun sinergi antara sekolah dan PTM. Targetnya adalah agar PTM menjadikan sekolah Muhammadiyah sebagai sekolah laboratorium atau sekolah binaan. Agar keinginan ini secepatnya tercapai, yang mendesak dilakukan adalah pemetaan mutu sekolah.

Langkah selanjutnya adalah memberikan pendampingan di bidang organisasi, manajemen, pembelajaran, dan penjaminan mutu (*quality assurance*). Untuk kepentingan inilah Majelis Dikdasmen Wilayah Jatim meluncurkan program *Muhammadiyah Branded School*. Melalui program ini kita akan menyaksikan sekolah Muhammadiyah terus bersinergi menjadi yang terbaik.

MENJADIKAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pada 27 Februari hingga 2 Maret 2011, saya berkesempatan mendampingi 25 sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur dalam acara studi banding di Malaysia dan Singapura. Total rombongan berjumlah 50 orang terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta pimpinan Majelis Dikdasmen Cabang dan Daerah. Tujuan utama studi banding adalah memperkuat kerjasama antar sekolah (*sister school*) Muhammadiyah Jatim dengan sekolah di Malaysia dan Singapura.

Saat berada di Malaysia, ada dua sekolah yang dikunjungi; Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki (SM-KAB) dan Sekolah Islam Adni (Adni School). Meski berkategori *international school*, namun keduanya memiliki karakter berbeda. SMKAB yang berada di Kuala Lumpur merupakan sekolah pemerintah dengan capaian terbaik 2010 sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi.

SMKAB didirikan pada 1958 dan kini menampung 1.233 peserta didik. Slogan yang diusung adalah nilai-nilai *kaizen* dengan spirit “penambahbaikan secara berterusan”. Jika diterjemahkan dalam bahasa kita, slogan ini kira-kira

berarti terus-menerus berbenah untuk menjadi yang terbaik (*continous improvement*).

Rombongan juga mengunjungi Adni School di Selangor. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Hasni bin Mohammed, yang juga menjadi konsultan pendidikan OKI. Yang menarik dari sekolah berbasis pesantren ini adalah model kurikulum yang dikembangkan. Beragam model kurikulum telah dikembangkan, seperti kurikulum pemerintah serta beberapa negara Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Kebijakan ini sekaligus memberikan kelonggaran peserta didik untuk mengikuti ujian berdasarkan kemampuannya. Peserta didik pun diberikan pilihan untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan pemerintah atau beberapa sekolah maju di luar negeri.

Karena itu ijazah yang diperoleh peserta didik Adni School sangat beragam. Sebagian kecil dari pemerintah Malaysia, dan sebagian besar dari berbagai sekolah di luar negeri. Yang menarik dari sistem pendidikan di Adni School ini adalah tidak menjadikan usia sebagai pertimbangan. Karenanya tidak mengherankan jika ada peserta didik yang berumur 20 tahun sudah menempuh pendidikan master dan doktor. Sistem ini sangat memungkinkan karena ada peluang bagi anak-anak usia dini untuk belajar di Adni School. Dengan model pesantren, kini Adni School telah menjadi rujukan belajar bagi ribuan peserta didik dari 30 negara.

Agenda studi banding di Malaysia kami jalani selama dua hari. Malam hari, 28 Februari, kami berkemas untuk melanjutkan perjalanan ke Singapura pagi harinya melalui bandara internasional Kuala Lumpur. Perjalanan dari Malaysia ke Singapura ditempuh dalam waktu kurang lebih satu jam. Bagi yang suka *travelling*, sebenarnya ada pilihan lain menuju Singapura yaitu dengan naik bus. Perjalanan

dengan bus ke Singapura melalui Johor memakan waktu kurang lebih lima jam. Siang hari, rombongan telah mendarat di bandara Changi, Singapura.

Agenda yang dilakukan di negeri singa ini adalah mengunjungi Madrasah Al-Junied Al-Islamiah dan Madrasah Al-Irsyad. Dua sekolah ini dipilih karena memiliki kesamaan dengan sekolah Muhammadiyah yang berkarakter *privat and Islamic school*. Lebih dari itu, dua sekolah swasta ini juga menunjukkan eksistensi di tengah kurangnya perhatian pemerintah.

Pada saat sesi *sharing* dengan Kepala Madrasah Al-Junied, Mokson bin Mahori, rombongan memperoleh kesan bahwa sekolah yang didirikan pada 1927 ini memiliki daya saing yang luar biasa. Sebagai sekolah *privat*, Madrasah Al-Junied mengandalkan kerjasama. Salah satunya adalah dengan Universitas Al-Azhar, Kairo. Model kurikulum yang dikembangkan pun berkiblat pada Universitas Al-Azhar. Tidak heran jika penguasaan ilmu-ilmu keislaman menjadi andalan madrasah ini.

Sementara di Madrasah Al-Irsyad, rombongan mendapatkan penjelasan mengenai aplikasi sesungguhnya dari pembelajaran berbasis *information and technology* (IT). Bukan hanya fasilitas yang ditawarkan Al-Irsyad. Sekolah ini juga menekankan pada pendidiknya untuk memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran. Sebagai *Islamic school*, Madrasah Al-Irsyad juga memberikan tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab dan Inggris. Dengan cara ini pimpinan sekolah berharap peserta didik memiliki keunggulan daya saing di level global.

Dua hari telah berlalu dan dihabiskan di Singapura. Rombongan pun harus bersiap kembali ke tanah air melalui Bandara Changi. Perjalanan dari Changi Airport menuju Juanda, Surabaya, membutuhkan waktu seki-

tar dua jam. Pesawat yang membawa rombongan adalah China Airline. Sebelum *take off*, saya mengamati Changi Airport tampak begitu rapi dan bersih. Rasanya lebih bagus dibanding Kuala Lumpur Airport. Selama perjalanan menuju bandara Juanda saya mengamati anggota rombongan bercengkerama kecil menyatakan tekad untuk membangun mimpi agar sekolah Muhammadiyah menjadi terbaik di masa mendatang.

Tepat pukul 23.00 wib, kami mendarat di Bandara Juanda. Saya melepas rombongan malam dengan segudang harapan. Semoga studi banding yang teramat singkat dapat menginspirasi guru, kepala sekolah, dan pimpinan Persyarikatan. Intinya, Muhammadiyah harus memiliki sekolah berkelas internasional. Modalnya, Muhammadiyah Jatim kini telah memiliki 9 sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) meliputi; SMAM 2 Surabaya, SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Gresik, SMAM 1 Ponorogo, SMKM 5 Babat (Lamongan), SMKM 1 Kepanjen (Malang), SMPM 5 Surabaya, SMPM 12 Gresik, dan SDM 4 Surabaya.

Pertanyaannya, apakah status RSBI itu telah menjadikan seluruh aspek sekolah: kurikulum, pembelajaran, lulusan, suasana akademik, fasilitas, manajemen lembaga dan keuangan, sistem informasi, serta penelitian dan publikasi, bertaraf internasional? Ini pertanyaan penting yang harus dijawab sekolah Muhammadiyah yang sudah dan sedang berproses menjadi RSBI.

Menurut saya, substansi berkelas internasional bukan hanya terletak pada muatan kurikulum dan evaluasi, sebagaimana yang selama ini dipahami sekolah RSBI. Yang juga penting adalah proses dan prosedur yang harus disiapkan sekolah sehingga menjadi berkelas internasional. Untuk mendukung keinginan tersebut jelas dibutuhkan

kemitraan dengan sekolah lain. Karena itu Majelis Dikdasmen PWM Jatim memfasilitasi sekolah untuk membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sekolah di luar negeri.

Jalanan MoU ini penting sebagai langkah awal untuk pertukaran budaya (*culture exchange*), pertukaran guru (*teacher exchange*), dan pertukaran peserta didik (*student exchange*). Pada Mei 2011 ini beberapa sekolah Muhammadiyah telah mengirim peserta didik dan guru di Malaysia dan Singapura, seperti dilakukan SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Ponorogo, SMPM 2 Surabaya, SMPM 5 Surabaya, dan SMPM 1 Surabaya. Melalui program Australia-Indonesia Bridge Project, peserta didik dan guru SMAM 2 Surabaya juga telah berkunjung ke Australia. Sebaliknya, peserta didik dan guru beberapa sekolah Australia juga telah bertamu di SMAM 2 Surabaya.

Saling mengenal kebudayaan antar sekolah lintas negara ini jelas sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik. Inilah yang harus dikembangkan sekolah Muhammadiyah yang telah RSBI. Dengan cara ini diharapkan sekolah Muhammadiyah akan mendapatkan pengakuan internasional (*international recognition*). Hingga pada saatnya guru dan peserta didik sekolah di luar negeri mau bertamu dan bertukar budaya di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Untuk mencapai tujuan ini jelas dibutuhkan kerja keras semua komponen; kepala, guru, karyawan, komite, dan Persyarikatan. Jadi, persoalannya kini berpulang pada komitmen semua komponen tersebut.

MEMPERKUAT PROGRAM RSBI

Hasil evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terhadap 1.305 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) patut dicermati. Evaluasi itu menyimpulkan bahwa program RSBI yang telah digulirkan pemerintah sejak 2005 dianggap gagal total. Indikatornya, hingga kini belum ada satu pun sekolah berlabel RSBI yang layak dinaikkan statusnya menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI). Padahal seharusnya untuk menjadi SBI, jenjang SD hanya membutuhkan waktu tiga tahun, SMP empat tahun, dan SMA/SMK lima tahun. Kegagalan ini harus menjadi evaluasi Kemendikbud. Sebab, ini menunjukkan program RSBI tidak dirancang dengan serius dan berkelanjutan. Padahal program RSBI telah menghabiskan anggaran milyaran rupiah. Anggaran itu dialokasikan dari APBN dan APBD.

Di antara sekolah berstatus RSBI, sejatinya telah sejak lama menanyakan keberlanjutan program ini pada pemerintah. Pertanyaan yang diajukan terutama berkaitan dengan perubahan status RSBI menjadi SBI. Karena tidak ada kepastian dari pemerintah, sebagian sekolah berstatus RSBI pun khawatir. Apalagi subsidi yang diberikan pemerintah mulai

dikurangi. Di tengah ketidakpastian ini sekolah melakukan *fundraising* guna menutupi biaya operasional. Inisiatif sekolah ini dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah mengenai pendidikan gratis. Bahkan dalam tingkat tertentu dapat mereduksi kampanye pendidikan gratis yang selama ini digelorkan pemerintah. Padahal dalam kenyataannya, kampanye pendidikan gratis itu cenderung menyesatkan karena tidak pernah ada dalam kenyataan.

Kegagalan program RSBI ini sangat mungkin disebabkan tiadanya titik temu antara kebutuhan operasional sekolah dan subsidi yang dialokasikan pemerintah. Akibatnya layanan yang diberikan sekolah berlabel RSBI sangat jauh dari yang diharapkan. Masyarakat pun sulit membedakan RSBI dan non-RSBI kecuali berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Karena biayanya sangat mahal, RSBI pun diplesetkan sebagian orang dengan “rintisan sekolah bertarif internasional.” Dalam soal biaya ini sekolah selalu berdalih bahwa untuk mewujudkan pendidikan bermutu jelas dibutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak tersedia anggaran yang memadai, sekolah tidak mampu meng-*upgrade* mutu guru dan menyediakan layanan terbaik pada peserta didik.

Kualifikasi guru tampaknya menjadi persoalan utama yang menyebabkan kegagalan program RSBI. Untuk menjadi SBI, kualifikasi guru dipersyaratkan minimal berpendidikan strata dua (S-2) pada jenjang SD (10 persen), SMP (20 persen), dan SMA/SMK (30 persen). Faktanya, kualifikasi guru seperti yang diharapkan ini belum tersedia. Karena itu hingga kini belum ada sekolah berstatus RSBI yang berubah menjadi SBI.

Padahal jika program RSBI dirancang serius dan berkelanjutan, mestinya persyaratan tersebut tidak terlalu sulit untuk dipenuhi. Untuk kepentingan ini pemerintah de-

ngan anggaran yang disediakan cukup menggandeng perguruan tinggi sebagai mitra. Selanjutnya, guru-guru RSBI diberi kesempatan melanjutkan studi ke jenjang S-2 berdasarkan kebutuhan setiap sekolah. Dengan demikian, sekolah yang kini berstatus RSBI dapat segera berubah menjadi SBI.

Langkah ini perlu secepatnya dilakukan karena Kemendikbud telah berketetapan hati untuk tidak menghapus program RSBI. Keinginan Kemendikbud ini perlu didukung karena kita semua juga berkepentingan dengan terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu dan berdaya saing internasional. Yang harus diingat, agar program RSBI ini tidak lagi mengalami kegagalan maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, program RSBI seharusnya tidak dipahami sebagai proyek yang berimplikasi subsidi dana dari pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena sebagian sekolah berpendirian RSBI sebagai proyek yang ada uangnya. Pemahaman ini terjadi lantaran pemerintah pusat mengalokasikan subsidi program RSBI dengan rincian; SD (Rp 500 juta/tahun selama tiga tahun), SMP (Rp 400 juta/tahun selama empat tahun), SMA (Rp 600 juta/tahun selama lima tahun), dan SMK (Rp 950 juta/tahun selama lima tahun). Subsidi ini belum termasuk alokasi bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Motivasi untuk memperoleh subsidi pemerintah ini tampak lebih menonjol saat sekolah mengajukan status RSBI. Sekolah terkadang tidak lagi mempedulikan sumber daya yang dimiliki. Ironisnya, pemahaman bahwa RSBI adalah proyek juga terjadi di lingkungan Kemendikbud mulai pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Kedua, konsep program RSBI sejauh ini lebih banyak menekankan pada aspek konten. Hal ini dapat diamati dari kecenderungan sekolah berstatus RSBI untuk mengadopsi kurikulum negara lain. Bahkan untuk kepentingan

ujian pun sekolah mengikuti standar kurikulum yang ditetapkan negara tersebut. Yang patut disayangkan, proses adopsi kurikulum dan standar ujian ini tidak diikuti dengan perbaikan manajemen, sumber daya guru, proses belajar mengajar, dan sarana prasarana.

Akibat terlalu berorientasi pada materi, maka peserta didik RSBI pun harus menerima beban ganda saat mengikuti ujian. Selain ujian dengan standar kurikulum negara lain, mereka juga wajib mengikuti ujian nasional (UN). Karena terlalu berorientasi pada materi, maka proses pembelajaran bagi mereka terkesan biasa-biasa saja. Apalagi proses pembelajaran itu tidak diikuti kemampuan menyampaikan materi dalam bahasa Inggris dengan baik. Karena faktor inilah RSBI sejatinya belum layak disebut bertaraf internasional.

Ketiga, kelemahan mendasar program RSBI selama ini juga tampak pada pemahaman terhadap konsep *sister school*. Program *sister school* telah menjadi salah satu persyaratan RSBI. Jujur harus dikemukakan, program *sister school* sejauh ini baru sebatas berwisata ke beberapa sekolah di luar negeri untuk memperoleh nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Selanjutnya dilakukan kunjungan oleh kepala, guru, dan peserta didik.

Semestinya konsep *sister school* dipahami dalam pengertian yang sebenarnya, yakni kerjasama antar sekolah RSBI dengan sekolah lain di negara maju. Kerjasama meliputi bidang kurikulum, pertukaran guru (*teacher exchange*), pertukaran peserta didik (*student exchange*), pertukaran budaya (*culture exchange*), serta penelitian dan publikasi. Yang sangat penting dari kegiatan *sister school* ini adalah terjadinya perubahan budaya dan etos kerja unsur-unsur di sekolah RSBI untuk menjadi yang terbaik.

MENENTUKAN BRANDING SEKOLAH

Masa pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran baru biasanya dibuka pada bulan Juni hingga Juli. Tetapi, beberapa sekolah swasta berkategori unggulan telah menutup pendaftaran peserta didik baru dan segera membuka daftar tunggu untuk tahun ajaran berikutnya. Kita juga menyaksikan banyak sekolah negeri dan swasta mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Bahkan beberapa sekolah terpaksa harus di-*merger* karena jumlah rombongan belajarnya tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan Dinas Pendidikan kota/kabupaten.

Fenomena kontras ini sekedar gambaran untuk sampai pada pertanyaan fundamental; kapa ada sekolah yang laku keras, setengah laku, dan bahkan tidak laku? Apa kualifikasi yang membedakan sekolah-sekolah tersebut? Adakah sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan *marketing* pada saat rekrutmen peserta didik baru?

Usaha memasarkan (*marketing*) pada tingkat tertentu biasanya telah dilakukan sekolah saat menjelang tahun ajaran baru. Pada saat itu semua sekolah disibukkan dengan kegiatan promosi untuk mendapatkan peserta didik

sebanyak mungkin. Usaha lebih keras akan dilakukan sekolah yang berkualifikasi biasa-biasa saja. Bahkan untuk lembaga pendidikan yang berkualitas di bawah standar, masa pendaftaran peserta didik baru akan menjadi saat menegangkan. Lembaga pendidikan seperti ini pasti akan was-was karena dibayangi kenyataan tidak mendapatkan peserta didik baru.

Pada saat bersamaan, kita juga menyaksikan beberapa sekolah harus menolak banyak pendaftar karena peminatnya berlimpah. Bahkan yang lebih unik lagi ada sekolah yang harus menutup pendaftaran sebelum masa penerimaan peserta didik baru resmi dibuka. Hal ini terjadi karena banyak sekolah berstatus unggulan telah menggunakan sistem tunggu (*inden*) pada saat pendaftaran.

Dalam sudut pandang pemasaran (*marketing*), lembaga pendidikan sesungguhnya menjual produk berupa jasa untuk menjadikan peserta didik berkualitas. Kenyataan inilah yang seringkali tidak disadari oleh pengelola lembaga pendidikan. Bahkan dalam beberapa kasus, seringkali masih ditemukan pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan adalah lembaga dakwah. Akibatnya, model pengelolaannya pun hanya mengandalkan perjuangan, pengabdian, dan keikhlasan.

Tentu saja ketiga modal ini penting, tetapi sangat tidak cukup untuk menjadikan pendidikan berkualitas. Lembaga pendidikan jelas membutuhkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai sarana dakwah juga merupakan pandangan yang benar. Tetapi, jangan pernah dilupakan bahwa lembaga pendidikan juga membutuhkan dana untuk biaya operasional. Salah satu sumber pendanaan adalah masyarakat. Di sinilah biasanya masyarakat akan mencari lembaga pendidikan yang dapat dipercaya, berkualitas, dan memiliki nilai tambah.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat yang berkepentingan terhadap lembaga pendidikan (*stakeholder*), sudah saatnya pengelola pendidikan mengubah paradigma lama yang hanya menekankan lembaga pendidikan sebagai sarana dakwah menjadi lembaga yang profesional. Pada konteks inilah penentuan label dan merek (*branding*) sekolah penting dilakukan untuk mempercepat *marketing*.

Persoalannya, *marketing* dalam dunia pendidikan bagi sebagian kalangan masih dianggap asing. Bahkan untuk lembaga pendidikan agama (Islam), *marketing* terkadang masih dianggap aib. Pandangan ini muncul karena dalam sejarah, kyai sebagai personifikasi orang yang memiliki otoritas keagamaan biasanya didatangi masyarakat. Ini berarti jika ada tradisi di mana seorang guru aktif mendakwahkan agama dengan cara datang langsung ke masyarakat, maka akan dipandang sebagai kultur yang tidak lazim.

Tetapi, saat ini pengaruh korporasi dalam dunia pendidikan juga sudah sangat kuat. Apalagi pemerintah dan DPR kini telah berupaya merampungkan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang oleh sebagian orang dikatakan sangat pro liberalisasi pendidikan. Dalam RUU BHP jelas dikatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari bidang usaha. RUU BHP dirancang untuk menjabarkan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing.

Dalam Perpres tersebut dikemukakan bahwa pendidikan termasuk dalam bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing dengan persyaratan tertentu (pasal 1 ayat 1). Pendidikan yang dimaksud di sini adalah mulai tingkat dasar, menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal. Ini berarti semangat liberalisasi yang

telah ada dalam Perpres semakin diperjelas RUU BHP. Melihat tantangan yang demikian berat rasanya pengelola lembaga pendidikan harus membuka diri dengan praktik manajemen modern agar tercipta kultur pengelolaan pendidikan yang baik (*good educational governance*).

Selain dituntut melakukan marketing, sekolah juga harus mampu menentukan *branding* dengan cara pemberian merek atau cap untuk menunjukkan keunggulannya. Penentuan *branding* ini penting dilakukan karena dapat digunakan membedakan satu sekolah dengan sekolah lain. *Branding* sekolah tentu tidak selalu harus bersifat akademik, tetapi dapat juga non akademik.

Ini berarti *branding* setiap sekolah dapat berbeda-beda dan sangat bergantung pada *resources* yang dimiliki. Misalnya, ada lembaga pendidikan yang menentukan *branding* sekolahnya di bidang non akademik seperti olahraga, seni, serta penerapan teknologi dan informasi (TI). Sementara ada sekolah lain yang memiliki *branding* di bidang akademik seperti selalu juara olimpiade sains, bahasa asing, dan rangking pertama untuk Ujian Nasional (UN). Sementara, untuk sekolah yang berkarakteristik keagamaan dapat menentukan *branding* sebagai lembaga penanaman nilai-nilai moral-agama.

Melalui bidang-bidang yang ditekuni tersebut, sekolah dapat melakukan *image building* pada masyarakat. Jika masyarakat ingin anaknya menjadi atlet nasional, maka tinggal mendaftarkan diri di sekolah yang ber-*branding* olahraga. Orang tua yang ingin anaknya menjadi ilmuwan kelas dunia, maka dicarilah sekolah ber-*branding* membangun prestasi akademik. Demikian halnya dengan orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai pemusik, fasih berbahasa asing, melek teknologi, dan berakhlak mulia, maka dicarilah sekolah dengan *branding* masing-masing.

Ahli marketing Indonesia, Hermawan Kartajaya, mengatakan bahwa untuk menentukan *branding* sekolah konsep yang dapat digunakan adalah dengan memahami hubungan *Positioning, Differentiation, dan Branding* (PDB). *Positioning* adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat di mata pelanggan (*customer*). Dalam dunia pendidikan, *customer* di sini adalah masyarakat pengguna pendidikan. *Differentiation* adalah usaha untuk membuat beda dengan yang lain. Sementara *branding* berarti memberikan merek atau cap sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenal.

Ketiga hal tersebut jelas memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kemampuan menempatkan diri, termasuk kejelian dalam melihat pesaing (*competitor*) dan pengguna (*user*), akan dapat memperkuat diferensiasi. Sebaliknya, kemampuan melakukan diferensiasi akan dapat memperkuat *branding*. Selanjutnya, *branding* yang dilakukan terus-menerus akan dapat memperkuat posisi (*positioning*). Maka kunci untuk menjadikan sekolah layak jual dan diminati masyarakat adalah salah satunya terletak pada kemampuan untuk menentukan *branding* sekolah yang didasarkan pada *resources* yang dimiliki.

MENEGUHKAN VISI PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH

Bidang pendidikan, sejak Muhammadiyah didirikan, telah dijadikan “ikon”. Amal usaha Muhammadiyah di bidang ini terus berkembang pesat, secara kuantitas dan kualitas. Hanya saja, fakta menunjukkan secara kualitas pendidikan Muhammadiyah sangat beragam. Terkadang dijumpai ada lembaga pendidikan di daerah tertentu berkembang sangat maju, sementara di tempat lain belum menunjukkan kiprah yang menggembirakan.

Sistem pendidikan nasional juga belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan di mata internasional. Data *Education for All (EFA) Global Monitoring Report 2011* yang dikeluarkan Unesco pada 1 Maret 2011 telah menunjukkan indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Filipina, Kamboja, dan Laos.

Pendidikan nasional juga dikritik karena belum mampu melahirkan individu yang berkarakter dan berintegritas kuat. Yang ironis, justru terjadi ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) yang melibatkan unsur-unsur di sekolah saat ujian nasional (UN). Kasus contekan massal di SD Negeri 2 Gadel, Surabaya, jadi hanya sekedar contoh.

Bahkan kasus ini dapat diibaratkan sebagai fenomena gunung es. Artinya, tampak sedikit di permukaan, meski sesungguhnya masih banyak kasus serupa yang belum diketahui publik. Juga muncul kecenderungan pemikiran yang berkeinginan untuk mereduksi pendidikan hanya sekedar pabrik ijazah (*diploma mills*). Ini jelas tampak dalam kebijakan tentang UN dan ujian sekolah. Pendidikan seharusnya diorientasikan untuk menyiapkan individu yang memiliki *soft skill* memadai sehingga mampu menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan.

Pertanyaannya, bagaimana seharusnya pendidikan Muhammadiyah menyikapi fenomena ini? Apa yang dapat dikontribusikan Muhammadiyah sehingga mampu mengangkat martabat pendidikan nasional di mata dunia? Seiring dengan persoalan ini, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memberikan respon yang seimbang. Dalam kaitan inilah Muhammadiyah perlu meneguhkan kembali visi pendidikannya agar terus dipercaya masyarakat dan mampu mencerahkan umat.

Pendidikan di era kini, sering juga dikatakan era global, menurut Zamroni, dihadapkan pada tiga kecenderungan. *Pertama*, munculnya kecenderungan komersialisasi dan komoditisasi pendidikan. Pemerintah yang semestinya mengambil peran besar dalam kesuksesan pendidikan banyak digantikan oleh masyarakat. Akibatnya, pendidikan layaknya proses ekonomi dan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme “pasar bebas”, setiap lembaga pendidikan berlomba-lomba melakukan promosi untuk merekrut konsumen.

Bahkan dalam rekrutmen konsumen ini, tidak jarang lembaga pendidikan melakukan manipulasi data untuk mengelabui masyarakat. Contoh kecenderungan komersialisasi pendidikan dapat dilihat melalui cara mengemasnya sehingga laku di pasar (*marketable*). Karenanya tidak menghe-

rankan jika kini bermunculan layanan fasilitas kelas eksekutif (kuliah Sabtu-Minggu), program kelas jauh, dan paket-paket pendidikan terstandar dan serba instan lainnya.

Dampak *kedua*, globalisasi melahirkan spirit internasionalisasi di lembaga pendidikan. Ini berarti pendidikan pun perlu distandarisasi guna meningkatkan daya saing global. Kebijakan pemerintah untuk membuat lembaga pendidikan berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), menunjukkan keinginan meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di mata dunia.

Dengan label RSBI, peserta didik dijanjikan memperoleh pelayanan akademik dan non-akademik yang berkelas dunia. Di lingkungan Muhammadiyah Jawa Timur misalnya, sekolah RSBI ada 9 buah, yakni; SMAM 2 Surabaya, SMAM 1 Gresik, SMAM 2 Sidoarjo, SMAM 1 Ponorogo, SMK 1 Kepanjen, SMK 5 Babat, SMP 5 Surabaya, SMP 12 Gresik, dan SD 4 Surabaya. Di samping RSBI, juga ada mekanisme *International Organization for Standardization* (ISO) sebagai standar untuk menentukan sistem manajemen mutu. Pertanyaannya, sudahkah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berlabel RSBI dan ISO memberikan layanan terbaik layaknya pendidikan berkelas dunia?

Dampak *ketiga*, munculnya kondisi bahwa kemampuan bangsa untuk hidup dalam era global tidak lagi ditentukan oleh modal fisik yang berupa kekayaan alam atau mesin industri. Untuk mencapai kesejahteraan pada era global ini dibutuhkan modal maya (*virtual capital*), meliputi; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*intellectual capital*), jaringan kerjasama yang didasarkan pada kepercayaan (*social capital*), dan watak atau moral yang dimiliki bangsa (*moral capital*). Tiga modal berharga ini sangat penting untuk dimiliki suatu bangsa agar dapat menentukan posisinya dalam persaingan di era global.

Di samping persoalan global, pendidikan Muhammadiyah juga dihadapkan pada problem riil kebijakan pemerintah yang terkadang tidak berempati dengan sekolah swasta. Kebijakan pengalokasian dana bantuan, sertifikasi, *inpassing* guru non-PNS, pendidikan gratis, pembukaan sekolah baru, dan penerimaan peserta didik baru yang melampaui kemampuan sekolah negeri, tampak sekali telah menimbulkan dampak kurang menggembirakan.

Untuk sekolah berkategori *excellent school* barangkali memiliki daya tahan kuat, tetapi sekolah Muhammadiyah berkategori kecil pasti akan merasakan dampak kebijakan tersebut. Akibatnya, beberapa sekolah Muhammadiyah kelas menengah ke bawah banyak yang berstatus "harus diselamatkan". Berkaitan dengan kondisi ini dibutuhkan data riil mengenai peta sekolah Muhammadiyah sehingga dapat diketahui berapa banyak yang berkategori besar, menengah, dan kecil.

Secara umum visi pendidikan Muhammadiyah harus diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan. Dalam Anggaran Dasar dikatakan maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bukan hanya pendidikan, seluruh amal usaha juga diorientasikan untuk mencapai tujuan tersebut.

Untuk mewujudkan visi pendidikan agar dapat dijadikan sarana mencapai tujuan dan dakwah Persyarikatan, maka perlu diperhatikan beberapa hal. *Pertama*, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan media untuk mengajarkan faham Islam yang berkemajuan. Faham Islam menurut Muhammadiyah terangkum dalam ajaran kembali pada al-Qur'an dan Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*).

Tentu tidak hanya berhenti di sini, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana cara kita kembali pada al-Qur'an

dan Sunnah (*kayfa narja' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*). Ini jelas berkaitan dengan problem epistemologi dan metodologi. Pada konteks inilah perlu juga dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang non-mazhab. Dikatakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, KH. Mas Mansur, bahwa Islam menurut Muhammadiyah tidak pernah terikat paham atau mazhab tertentu.

Lebih jauh Mas Mansur menyatakan bahwa “paham agama” itu sejatinya bukan “agama”. Karena itu, langkah kedua dari 12 Langkah Muhammadiyah dikatakan, paham agama itu harus diperluas. Yang tidak boleh diperluas adalah agama karena merupakan wahyu Allah dan sudah sempurna. Ini jelas peringatan bagi kita dan menjadi tugas lembaga pendidikan untuk memberikan pencerahan pada umat. Lembaga pendidikan harus turut mengajarkan dan memperluas ajaran agama sehingga ajaran Islam bersifat kompatibel dengan segala waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Kedua, pendidikan Muhammadiyah harus mencerahkan sehingga mampu menghasilkan individu yang berakarakter dan berintegritas. Wacana pendidikan karakter ini kini sedang digalakkan seiring dengan problem demoralisasi yang dihadapi bangsa. Bukan hanya di bidang pendidikan, persoalan demoralisasi juga dijumpai di lembaga-lembaga publik seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Prof. Din Syamsuddin, kondisi bangsa saat ini sedang dihinggap *moral illiteracy* (buta aksara moral). Indikatornya, orang tidak lagi mampu membedakan perilaku baik dan buruk. Bahkan lebih ekstrim, Taufiq Abdullah menyatakan saat ini telah terjadi gejala *spiral stupidity* (lingkaran kebodohan). Kasus suap-menyuap dan korupsi yang terus meningkat mulai dari rakyat kebanyakan hingga elit menunjukkan kebenaran potret yang disinyalir kedua tokoh tersebut.

Ketiga, pendidikan Muhammadiyah harus mendorong terwujudnya nilai-nilai tolong-menolong (al-Ma'un). Perbincangan mengenai al-Maunisme (*the theology of al-Ma'un*) begitu menonjol di kalangan warga Muhammadiyah. Selain ayat 104 surat Ali Imran yang menginspirasi pendirian Muhammadiyah, keluarga besar Persyarikatan juga mengenal dengan baik kajian tafsir KH. Ahmad Dahlan terhadap surat al-Ma'un. Bahkan surat al-Ma'un inilah yang dijadikan dasar bagi Kyai Dahlan untuk menggali sumber dana masyarakat guna membangun basis teologi pengembangan amal sosial Muhammadiyah.

Kisah inspiratif pembelajaran Kyai Dahlan terhadap peserta didik-peserta didiknya mengenai surat al-Ma'un ini dikisahkan oleh Syuja'. Santri Kyai Dahlan ini suatu saat memberanikan diri untuk bertanya pada gurunya; "Kyai, mengapa surat al-Ma'un dan pelajaran tafsirnya diulang-ulang?" Kyai Dahlan pun menjawab; "Apakah kalian sudah mengerti betul?" Syuja' menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah hafal dan mengerti. Namun Kyai Dahlan kembali bertanya; "Apakah sudah diamalkan?" Syuja' pun menjawab bahwa ia dan teman-temannya sudah mengamalkan dengan membaca surat al-Ma'un berulang-ulang saat shalat.

Mendengar jawaban ini, Kyai Dahlan menyatakan bahwa maksud mengamalkan adalah mempraktikkan kandungan surat al-Ma'un. Untuk menunjukkan pengertian ini, Kyai Dahlan pun memerintahkan agar para santrinya mencari anak yatim dan fakir miskin kemudian memberi mereka sabun, pakaian, makanan, dan minuman. Pemahaman inilah yang kemudian melahirkan teologi amal shaleh, yang populer disebut al-Ma'unisme.

Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai al-Ma'un ini perlu digalakkan sehingga sekolah Muhammadiyah yang besar

dapat membantu sekolah yang kecil. Praktik subsidi silang yang dilakukan peserta didik dari keluarga kaya terhadap sisiwa miskin juga merupakan cerminan dari ajaran al-Ma'unisme. Pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai ditutupnya SMAM 6 (Bubutan) dan SMAM 8 (Tandes) sungguh menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah.

Selama ini kita menjadikan pendidikan sebagai "ikon" Muhammadiyah, tapi ternyata ada sekolah kita yang harus diselamatkan karena terancam ditutup pemerintah. Salah satu penyebabnya, sekolah ini tidak mampu mendapat jumlah minimal peserta didik baru sebagaimana syarat pemerintah. Bandingkan dengan sekolah Muhammadiyah lain yang berjubel dan membuang begitu banyak pendaftar. Menghadapi situasi ini, tidak ada jalan lain yang harus dilakukan kecuali menghidupkan kembali nilai-nilai al-Ma'un. Sinergi sekolah besar-kecil mutlak diperlukan agar sekolah Muhammadiyah mampu *survival* di tengah persaingan yang ketat.

Keempat, pendidikan Muhammadiyah harus mampu menjadi pelopor pendidikan berbasis multikulturalisme sejalan dengan pluralitas masyarakat. Pendidikan harus disadari sebagai bagian dari ruang publik, dan siapa pun dapat bergabung dengan sekolah Muhammadiyah. Karya Abdul Mu'thi dan Fajar Riza Ul Haq membuka mata kita betapa pendidikan berbasis multikulturalisme mutlak diperlukan. Apalagi realitas menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik atau guru di sekolah Muhammadiyah berlatar belakang sosial warga persyarikatan.

Bahkan pengalaman di daerah yang minoritas Muslim, menunjukkan banyak sekolah Muhammadiyah yang dijadikan tempat belajar keluarga non-Muslim. Salah satu contoh adalah di Nusa Tenggara Timur (NTT), tepatnya Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Ternyata

mayoritas mahasiswanya adalah penganut Kristen, sehingga banyak alumni UMK yang berkiprah sebagai pastor, romo, biarawati, dan fungsional gereja. Realitas ini menyebabkan UMK seringkali diplesetkan menjadi "Universitas Muhammadiyah Kristen".

Kelima, pendidikan Muhammadiyah harus mampu memadukan nilai-nilai keikhlasan dan profesionalitas. Orang seringkali mempertentangkan prinsip bekerja profesional di Muhammadiyah dengan nilai-nilai keikhlasan. Bekerja dengan ikhlas dianggap serba gratisan dan tidak profesional. Sebaliknya, bekerja profesional dimaknai kurang ikhlas karena menuntut gaji mahal. Agar dua sifat ini tidak dipertentangkan, perlu dijelaskan secara utuh. Menurut Watik Pratiknya, keikhlasan itu berada dalam kawasan niat (*state of mind*). Sedangkan profesionalitas berada dalam manajemen perjuangan (*state of action*). Sehingga prinsip keikhlasan dan profesionalitas adalah persyaratan yang saling melengkapi untuk suksesnya suatu perjuangan.

Selanjutnya, Watik menyebut empat ciri bekerja profesional; (1) memanfaatkan ilmu dan teknologi, (2) dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya, (3) memperhatikan dan mengupayakan optimalisasi hasil kerja, (4) pertimbangan rasionalitas yang tinggi dengan memanfaatkan manajemen. Ciri pertama berkaitan dengan pemanfaatan Iptek untuk memperlancar tugas dan melaksanakan program. Misalnya, pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) untuk tugas-tugas administrasi, metode hisab dalam penentuan awal dan akhir Ramadan, pemanfaatan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam berdakwah, serta penggunaan psikotest untuk mengenali gejala kejiwaan calon pimpinan dan karyawan AUM.

Ciri kedua berkaitan dengan pertimbangan penempatan atau rekrutmen pimpinan dan karyawan amal usaha ber-

dasarkan kompetensi. Karena itu, ungkapan; *the right man on the right place*, terasa sangat relevan. Yang tidak boleh dilakukan adalah prinsip; *man with the wrong place* atau *man with the many places*. Ini berarti harus diupayakan agar fungsionaris organisasi dan pimpinan amal usaha benar-benar bertugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Ciri ketiga berkenaan dengan pentingnya perencanaan yang mapan agar setiap program dapat menghasilkan kerja yang optimal. Dalam kaitan inilah pola pikir *need for achievement* (dikenal dengan rumus; $N+Ach$) perlu dibudayakan pimpinan amal usaha, termasuk pendidikan. Ciri ketiga ini berkait erat dengan ciri terakhir karena menekankan perlunya penggunaan manajemen dalam mengelola sumber daya.

Watik Pratiknya mengingatkan agar dalam melaksanakan program kita tidak bersemboyan "sebisanya" atau "asal jadi" dikarenakan ini mengindikasikan belum profesional. Kita harus menyatukan niat dan ikhtiar sehingga tidak boleh menyatakan; "Yang penting *kan* niatnya, bagaimana hasilnya terserah Tuhan". Islam mengajarkan bahwa harus ada kesinambungan antara niat dan ikhtiar. Nabi memang mengatakan; *Innama al-a'mal bi al-niyyati*, tetapi bukanlah al-Qur'an juga menyerukan; *innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim*. Ini berarti keselarasan niat dan ikhtiar merupakan indikasi profesionalitas. Profesionalisme pengelolaan pendidikan juga dicirikan dalam rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan yang menekankan pada *achievement* (prestasi), bukan *ascription* (berdasarkan status).

Keenam, pendidikan Muhammadiyah harus dijadikan sarana untuk melakukan kaderisasi. Dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikatakan bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Karena itu harus di-

pastikan bahwa seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah berstatus anggota Muhammadiyah.

Ini penting agar tidak muncul opini bahwa karyawan amal usaha Muhammadiyah sekedar bekerja dan mencari nafkah, tidak mau peduli dengan kegiatan persyarikatan di cabang dan ranting di mana ia bertempat tinggal. Berkaitan dengan ini, tugas pimpinan sekolah bersama persyarikatan adalah melakukan pembinaan agar warga sekolah memahami dan terlibat aktif dalam kegiatan Muhammadiyah

Posisi Muhammadiyah untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional dan indeks pembangunan manusia jelas sangat besar. Ini karena amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan mulai pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi tersebar di seluruh penjuru negeri. Yang harus disadari, pendidikan merupakan investasi jangka panjang sehingga hasilnya seringkali tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat.

Seorang senator dan penggagas yayasan beasiswa pertukaran mahasiswa Amerika Serikat dengan negara asing, William Fulbright, pernah menyatakan; *the education is slow moving, but powerful force*. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa meski investasi pendidikan itu bergerak lambat namun memiliki kekuatan yang luar biasa di masa mendatang. Relevan dengan itu, maka Muhammadiyah harus terus berkiprah guna menjadikan pendidikan sebagai media untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa yang berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi.

MENUMBUHKAN MULTIKULTURALISME PESERTA DIDIK

Menurut Furnivall, pluralitas (kemajemukan) masyarakat dapat dicirikan sebagai orang yang hidup berdampingan secara fisik. Tetapi, karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnis, politik, dan agama, mereka hidup terpisah dan tidak tergabung dalam suatu komunitas. Dalam skala lebih kecil, guru dapat mengamati kecenderungan peserta didik ketika berinteraksi dan mengambil posisi tempat duduk, yang biasanya hanya dengan teman yang memiliki kesamaan latar belakang.

Dalam kasus lebih luas, realitas kemajemukan juga dapat diamati melalui kemunculan sekolah dengan karakteristik tertentu yang menunjukkan adanya eksklusivitas. Misalnya ada lembaga pendidikan yang didesain untuk melayani suatu etnis dan faham keagamaan tertentu. Kondisi ini jelas rentan menimbulkan persoalan sosial karena lembaga pendidikan merupakan ruang publik yang seharusnya dijadikan media berinteraksi antarkelompok di masyarakat.

Secara ringkas multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan terhadap adanya pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat,

dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui. Ini berarti arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasannya.

Untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap multikulturalisme dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan intrakurikuler yang tersistem dalam model pembelajaran berbagai mata pelajaran jika dilakukan secara demokratis dapat dijadikan sarana menumbuhkan kesadaran multikulturalisme. Ini berarti para guru harus menghadirkan model pembelajaran yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk olahraga, musik, seni, pramuka, dan teater, juga dapat menjadi media menumbuhkan multikulturalisme. Bahkan melalui beragam kegiatan inilah peserta didik dapat bercanda, tertawa, bertegur sapa, dan bermain lepas tanpa mempedulikan latar belakang sosialnya.

Kesadaran terhadap multikulturalisme jika ditanamkan pada peserta didik akan dapat menyebabkan mereka saling memahami kekhasan yang dimiliki dan meneguhkan identitas dirinya. Dalam hal ini kekhasan tidak sama dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial, etnis, dan agama. Teori Lavinias menyatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun, hubungan aku dengan yang lain tidak melahirkan kekerasan. Jadi, kehadiran yang lain justru membuahkan kedamaian dan menumbuhkan struktur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan

orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Orang dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga dinamismenya tidak hanya berhenti pada persepsi, melainkan mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Teori Lavinas juga mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan *nir*-kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut yang lain melakukan hal yang sama. Penampakan wajah orang lain dapat terjadi jika ada komitmen untuk saling bertemu. Ini berarti untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme tidak boleh hanya berhenti pada pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. Multikulturalisme menuntut komitmen setiap orang untuk menghargai dan menghormati keragaman.

Nah, berbagai kegiatan di sekolah yang melibatkan peserta didik dapat digunakan sebagai media untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme. Melalui berbagai kegiatan intra dan ekstra peserta didik dapat didorong untuk berbaur tanpa mempedulikan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama. Melalui perjumpaan-perjumpaan informal dalam bentuk permainan dan kesenian mereka justru dapat melupakan status sosial yang seringkali menjadi jarak yang memisahkan.

Sekarang, tugas guru adalah menciptakan sebanyak mungkin sarana yang dapat menjadi perjumpaan informal peserta didik agar dapat saling menghargai dan menghormati keragaman.

TUNTUTAN BUDAYA MUTU

Prestasi membanggakan diraih tiga kampus Indonesia di level dunia. ITB, UI, dan UGM berhasil masuk 100 besar universitas ternama di Asia. Bahkan, ITB berhasil masuk peringkat ke-82 dari 200 universitas ternama di dunia. Data ini dapat diakses melalui *The 4 International Colleges and Universities* (www.4icu.org) atau *World Universities Web Ranking*.

Sebelumnya, pada September 2011, UI dinobatkan sebagai satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil masuk *Top 300 Universities in the World*. Berdasar penilaian *Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking*, UI menduduki peringkat ke-217. Indikator yang digunakan dalam pembuatan *ranking* ini meliputi *academic reputation* (40 persen), *employer reputation* (10 persen), *student/faculty ratio* (20 persen), *citations per faculty* (20 persen), *international faculty* (5 persen), dan *international students* (5 persen).

Pemeringkatan universitas secara berkala ini penting untuk menjamin terwujudnya budaya mutu. Cara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pimpinan perguruan tinggi (PT) untuk berkompetisi menjadi yang terbaik dalam penjaminan mutu (*quality assurance*). Pada Juni 2009, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) pernah memub-

likasikan hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi PT seluruh Indonesia. Pada saat itu, ada 387 PT yang diberi instrumen dan dinilai.

Hasilnya, Dikti menetapkan 68 kampus yang layak disebut berpredikat *good practices* dalam melaksanakan penjaminan mutu. Dasar penilaian yang digunakan meliputi kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi (mahasiswa, lulusan, dan dosen), suasana akademik, sarana prasarana, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian masyarakat, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri. Penjaminan mutu berarti proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pada sisi lain, keabaian PT dalam menjamin mutunya bisa dilihat dari maraknya keluhan lulusan ketika sudah lulus. Seperti akhir 2010 silam, dalam Kolom Pembaca Menu-lis sebuah Koran Jawa Pos (20/12/10), memuat keluhan seorang lulusan Program Studi D-3 Pariwisata dari sebuah perguruan tinggi (PT) negeri ternama di Surabaya. Inti keluhannya terkait dengan kegagalannya mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena ternyata program studi (prodi) yang meluluskannya belum berstatus terakreditasi.

Jika diteliti, rasanya kasus ini banyak dialami lulusan dari PT negeri dan swasta. Sebab, bukan hanya untuk mengikuti tes CPNS, tetapi banyak juga instansi swasta yang mensyaratkan pelamar mencantumkan status akreditasi prodi pada saat melamar kerja. Jika tidak berstatus terakreditasi, maka jangan harap dapat mengikuti tes. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap begitu banyak pemegang ijazah dari prodi di PT yang belum terakreditasi? Dapatkah PT sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah dianggap melakukan kebohongan publik sehingga dapat dituntut secara hukum?

Beberapa pertanyaan tersebut layak mendapat perhatian, terutama bagi mahasiswa dan PT. Mahasiswa termasuk pihak yang sangat berkepentingan dengan status akreditasi prodi dan PT tempatnya belajar. Sebab, untuk mendapat pekerjaan yang mempersyaratkan ijazah dengan kualifikasi akreditasi tertentu (misalnya Terakreditasi A, B, atau C) mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan. Apalagi jika ternyata prodi dan PT yang mengeluarkan ijazah belum berstatus terakreditasi. Karena itu, mahasiswa harus rajin menanyakan status akreditasi prodinya. Calon mahasiswa juga harus memastikan bahwa prodi pilihannya telah berstatus terakreditasi. Kecermatan dalam menentukan pilihan prodi ini penting agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Keterlambatan atau keabaian beberapa prodi di PT untuk mendapat status terakreditasi salah satunya karena belum terbiasa menerapkan konsep penjaminan mutu. Penjaminan mutu di PT berarti proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. Dengan demikian, maka tujuan dari penjaminan mutu adalah mewujudkan visi dan misi PT, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Menurut hasil penelitian Tim Dosen Universitas Gadjah Mada (2007) dikatakan bahwa yang dimaksud kebutuhan *stakeholders* meliputi kebutuhan sosial, dunia kerja, dan profesional. Ini berarti pihak yang sangat berkepentingan dengan layanan mutu prodi bukan hanya mahasiswa, melainkan juga dunia kerja dan kelompok profesional.

Secara konstitusional, penjaminan mutu PT merupakan kewajiban. Diktum UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan urgensi kebijakan yang mengatur standar untuk menjamin mutu pendidikan (pasal 50 ayat 2). PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga mengatur aspek detail dalam proses

penjaminan mutu. Demikian juga rumusan *Higher Educational Long Term Strategy* (HELTS) yang diluncurkan Kemendikbud telah menegaskan urgensi *quality assurance* sebagai wujud tanggung jawab PT pada publik.

Tidak bisa tidak, setiap PT diharuskan untuk melakukan kegiatan audit, baik internal maupun eksternal, oleh lembaga-lembaga independen seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Yang perlu ditekankan bahwa sistem penjaminan mutu ini harus dilakukan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) agar ada jaminan bahwa lulusan pendidikan tinggi adalah pribadi yang cerdas dan kompetitif. Dalam jangka panjang, penerapan penjaminan mutu PT diharapkan dapat meningkatkan indeks perkembangan manusia (*human development index*) sehingga memiliki daya saing di level internasional.

Karena telah menjadi amanah konstitusi dan tuntutan global, setiap pendidikan tinggi harus melakukan penjaminan mutu. Sebab, di masa mendatang, eksistensi PT negeri dan swasta tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Nasib PT akan sangat ditentukan oleh penilaian mutu oleh *stakeholders*.

Hermawan Kartajaya, guru marketing dunia, pernah menyatakan bahwa *stakeholders* memiliki *positioning* yang sangat tinggi. PT yang tidak cerdas merespons kemauan pelanggan (*customer*) pasti akan ditinggalkan. Jika situasi sudah demikian, dapat dibayangkan nasib PT tersebut. Karena itu, salah satu tugas PT adalah menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara meningkatkan layanan agar *stakeholders* terpuaskan.

Substansi pengertian mutu sesungguhnya berkaitan dengan terpenuhinya standar dan janji yang telah diutarakan PT pada *stakeholders* dalam penyelenggaraan tridharma. Persoalan pemenuhan standar dan janji sebagai salah satu indikator PT

bermutu ini penting dikemukakan. Sebab, banyak PT yang telah menentukan standar dan janji pada pelanggan, tetapi dalam perjalanannya tidak pernah diukur pemenuhannya.

Kondisi yang barangkali masih menguntungkan bagi PT yang belum mewujudkan budaya mutu adalah kondisi masyarakat yang tidak banyak menuntut dan tidak tahu mutu layanan PT. Akibatnya, PT merasa nyaman dengan apa yang dilakukan. Tetapi, harus disadari, perkembangan masyarakat telah menunjukkan sikap yang semakin kritis. Ini berarti PT harus berusaha meningkatkan mutu layanan pada pengguna agar tetap dipercaya oleh stakeholders.

Fenomena masyarakat yang tidak mau tahu dengan mutu layanan pendidikan sesungguhnya tidak hanya dijumpai di level pendidikan tinggi. Pendidikan tingkat dasar dan menengah juga menjumpai kondisi yang sama. Masyarakat umumnya tidak memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya penjaminan mutu pendidikan. Yang terpenting adalah anaknya dapat mengenyam pendidikan. Sementara persoalan mutu pendidikan dianggap bukan urusan mereka, melainkan tugas lembaga pendidikan. Padahal, masyarakat sebagai pengguna sejatinya memiliki hak untuk memperoleh layanan yang terbaik.

Menguatnya kesadaran mutu dari masyarakat akan mendorong sistem pendidikan nasional menuju banyak prestasi di level nasional dan internasional. Untuk itu, pimpinan lembaga pendidikan tidak bisa tidak harus melaksanakan penjaminan mutu sebagai wujud akuntabilitas pada masyarakat. Penjaminan mutu harus menjadi budaya seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

MEMBANGUN KAMPUS BERBASIS RISET

Pada 2-9 Agustus 2010, saya berkesempatan mengikuti program *Developing Research Capacity* di University of Melbourne, Australia. Acara ini diikuti 17 orang terdiri atas pejabat dan dosen IAIN Sunan Ampel. Ketika melepas rombongan, Pak Rektor, Prof. Nur Syam, berpesan agar pejabat dan dosen yang mengikuti program ini membangun mimpi untuk mengembangkan institusi. Pesan ini sangat relevan karena setiap perubahan selalu diawali dari mimpi. Bermimpi itu berarti membayangkan bahwa suatu saat lembaga tempat kita bekerja menjadi lebih baik. Inilah kekuatan mimpi bagi seorang pemimpin lembaga.

Perjalanan menuju Melbourne sengaja memilih waktu malam hari. Rute perjalanan diatur dari Bandara Juanda menuju Denpasar. Setelah transit selama dua jam di Denpasar, perjalanan dilanjutkan menuju Bandara Tulla Marine, Melbourne, dan mendarat pukul sembilan pagi setempat. Ada selisih waktu tiga jam lebih cepat jika dibanding Surabaya. Meski sudah agak siang, namun udara terasa sangat segar. Suhu udara mencapai empat derajat celcius.

Periode Juli dan Agustus kota Melbourne dipastikan terasa sangat dingin. Karena itu, tidak mengherankan jika begitu mendarat di Tulla Marine, perubahan suhu sangat

terasa. Bersama rombongan, saya pun langsung menuju Rydges on Swanston Hotel. Di tempat inilah rombongan bermalam selama mengikuti program. Kebetulan jarak hotel dengan tempat pelatihan, Center for the Study of Higher Education (CSHE) kompleks University of Melbourne, hanya berjarak sekitar 100 meter.

Untuk mengisi waktu longgar, saya memanfaatkan kesempatan untuk melihat situasi kota Melbourne. Bersama rombongan, saya berkunjung ke beberapa tempat seperti pusat pemerintahan, kantor parlemen, pasar tradisional, dan ACER (Australia Council Education Research) di 19 Prospect Hill Road Cambrwell. Perjalanan menuju ACER ditempuh melalui kereta listrik bawah tanah. ACER adalah salah satu mitra yang dimiliki University of Melbourne untuk mengembangkan penelitian.

Linkage Fungsi Tridharma

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini. Salah satunya adalah keharusan setiap civitas kampus untuk membuat *linkage* tiga kegiatan perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tiga kegiatan ini dikenal dengan nama tridharma perguruan tinggi. Tetapi, dalam praktiknya fungsi tridharma perguruan tinggi masih dijalankan secara terpisah, tidak saling berhubungan. Karena itu diperlukan usaha merevitalisasi fungsi tridharma dengan menjadikan penelitian sebagai dasar meningkatkan mutu pengajaran dan pengabdian masyarakat.

Sayangnya, civitas perguruan tinggi belum sepenuhnya menjadikan kegiatan penelitian sebagai *base* untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pengabdian. Maka, jangan heran jika masih ada dosen yang menunaikan tugas pengajaran dengan metode konvensional. Di antara

indikator yang dapat diamati adalah tiadanya pemutakhiran referensi. Masih banyak dosen yang menjadikan buku terbitan lama sebagai referensi. Metode pengajaran yang dikembangkan pun masih dominan ceramah, bersifat *teacher center* dan *information delivery*.

Seorang dosen senantiasa dituntut meng-*upgrade* pengetahuannya karena perkembangan pendidikan sangat pesat. Perkembangan tersebut mengharuskan dosen melakukan pembelajaran yang bersifat *student center*, *information exchange*, dan menggunakan referensi mutakhir. Dengan menempatkan mahasiswa sebagai mitra belajar, bukan obyek transformasi pengetahuan, diharapkan ada peningkatan gairah keilmuan. Mereka diharapkan senantiasa merasa ingin tahu (*curiosity*). Menumbuhkan keberanian mahasiswa untuk bertanya dan berpendapat juga dapat dilakukan melalui metode *information exchange*. Model pembelajaran inspiratif ini sangat dibutuhkan. Pemutakhiran sumber belajar juga perlu dilakukan karena ilmu pengetahuan sejatinya bersifat sementara (*tentative*).

Diskusi saya dengan Prof. Richard James, Prof. Noel L. Stonehouse, Prof. Michel McBain, dan Dr. Chi Baik, memberikan pelajaran berharga mengenai urgensi mengembangkan pembelajaran berbasis penelitian. Untuk memulai tugas ini, pendidik harus mendesain kegiatan pembelajaran dengan lebih mengutamakan model induktif. Model pembelajaran berbasis induktif ini mengharuskan mahasiswa mengamati problem sosial yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian dirumuskan solusinya.

Model pembelajaran ini ternyata sudah dipraktikkan sejak pendidikan tingkat dasar dan menengah. Rasanya, metode ini dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan pembelajaran yang bercorak deduktif. Mahasiswa sudah saatnya

dilatih untuk memiliki *sense* mengobservasi fenomena. Melalui cara ini kita berarti telah memberikan *soft skill* pada mahasiswa untuk menjadi calon peneliti pada masa mendatang.

Penekanan model berpikir induktif rasanya perlu ditumbuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Sebab, jika kita menengok sejarah Islam abad VII-XIII M, maka kita akan menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadikan Islam mengalami masa keemasan adalah berkembangnya tradisi berpikir induktif di kalangan ilmuwan Muslim. Tokoh seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, al-Razi, al-Ghazali, Ibn Rusyd, dan Ibn Khaldun, merupakan ilmuwan Muslim yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggabungkan model berpikir deduktif dan induktif. Mereka tidak hanya dikenal ahli agama dan filosof, melainkan juga saintis handal. Karenanya tidak heran jika periode tersebut dinamakan Philip K. Hitti dalam *History of The Arabs* (1974) sebagai Abad Mu'jizat Arab, masa ditemukannya banyak disiplin ilmu oleh ilmuwan Muslim.

Marilah kita bandingkan dengan tradisi berpikir sebagian besar generasi Muslim masa sesudahnya. Mereka jelas sekali lebih mengandalkan model berpikir deduktif. Sebagai contoh, generasi Muslim masa kini kalau menjumpai ada temuan baru yang dilahirkan ilmuwan Barat selalu mengatakan bahwa semua itu sudah ada dalam al-Qur'an. Bahwa tidak ada sesuatu yang terlewatkan untuk diajarkan dalam al-Qur'an itu merupakan pernyataan Ilahi yang jelas benar.

Tetapi, persoalannya adalah bagaimana kita mampu menjadi pelaku sejarah yang menunjukkan pada dunia bahwa ajaran Islam memang benar. Islam juga dikatakan memiliki ajaran yang kompatibel dengan setiap waktu dan tempat (*shalih likulli zaman wa makan*). Dalam hal ini tantangan kita adalah menghadirkan bukti yang bersifat empirik bahwa Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah dan berbagai jenis peradaban umat

manusia. Pada konteks inilah diperlukan kultur berpikir yang menyeimbangkan model deduktif dan induktif.

Bukan hanya pada aspek pembelajaran yang seharusnya didasarkan pada penelitian. Peningkatan mutu layanan pengabdian masyarakat juga membutuhkan penelitian agar tidak berjalan di tempat. Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjadi program andalan pengabdian masyarakat ternyata belum didesain dengan berdasar *need assessment* yang jelas. Bahkan jika perlu program KKN harus melibatkan berbagai sumberdaya lintas fakultas sehingga memungkinkan terjadinya pendekatan yang bersifat interkoneksi (*interconnected study*) terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada konteks inilah perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai kebutuhan masyarakat sehingga lembaga dapat mendesain program unggulan dan memilih wilayah yang tepat.

Di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta, pengabdian masyarakat umumnya dipahami dalam bentuk kegiatan dakwah Islamiyah. Ini dapat diamati dari kinerja dosen. Umumnya mereka mengisi kegiatan khutbah sebagai manifestasi program pengabdian masyarakat. Tradisi ini jelas tidak salah karena khutbah Jum'ah, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, serta mengisi pengajian, adalah bagian dari pengabdian masyarakat.

Yang menjadi persoalan adalah seakan tidak ada lagi kegiatan di luar khutbah yang dapat dijadikan andalan. Padahal kegiatan seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta huruf, pendidikan anak jalanan, pendampingan APBD pro rakyat, dan pendidikan politik masyarakat, dapat menjadi pilihan program pengabdian masyarakat. Agar pilihan program pengabdian masyarakat bermutu dan tepat sasaran, maka harus didasari kegiatan penelitian yang dilakukan se-

cara periodik. Karena itulah membuat *linkage* fungsi tridharma perguruan tinggi mutlak diperlukan.

Revitalisasi Penelitian

Inspirasi dari University of Melbourne yang juga perlu di-*share* adalah substansi penelitian. Menurut Prof Richard James, Director CSHE, substansi penelitian adalah publikasi dan kegunaan. Ini berarti penelitian harus selalu diorientasikan pada publikasi nasional dan internasional. Melalui publikasi ini diharapkan terjadi komunikasi timbal balik antar ilmuwan. Bermula dari sinilah keinginan membangun *academic atmosphere* pada saatnya akan tercapai. Jujur harus diakui, bahwa masih banyak peneliti yang kurang memiliki keberanian untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.

Hasil penelitian juga harus mampu memberikan kontribusi yang jelas bagi pengembangan keilmuan dan manfaat pragmatis bagi kehidupan umat. Prof. Michel McBain, Manager Research Melbourne Graduate School of Education, menekankan pentingnya penelitian yang berkategori terapan (*applied research*). Agar hasil penelitian terapan bermutu, University of Melbourne menyiapkan anggaran berlimpah. Bahkan institusi menyiapkan anggaran lebih banyak untuk merekrut sumber daya terbaik yang diambil dari berbagai negara.

Strategi itu dilakukan untuk meningkatkan *branding* institusi sehingga pada saatnya mampu menjadi daya tarik mahasiswa. Maka, tidak mengherankan jika di University of Melbourne memiliki ilmuwan sekaliber Prof. Merle C. Ricklefs, Prof. Abdullah Saeed, dan Prof. Timothy Linsey. Nah, bagaimana dengan nasib penelitian di perguruan tinggi Indonesia?